

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu masalah di Indonesia sejak dahulu hingga sekarang, terutama sejak terhampas dengan pukulan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak tahun 1997. Kemiskinan sering kali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan, semata-mata kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multi dimensi yang tidak mencakup aspek ekonomi saja akan tetapi juga dimensi sosial budaya dan dimensi struktural atau politik. Kemiskinan juga merupakan salah satu masalah yang memiliki beban cukup berat dalam pembangunan yang ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, serta ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi. Beberapa upaya dari pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan telah dilakukan, tetapi hasilnya tidak begitu menunjukkan perubahan yang signifikan.

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat dalam jangka waktu cukup lama dapat memengaruhi perkembangan dan kemajuan masyarakat tersebut untuk masa-masa berikutnya.

Susanto dalam Soetomo (2009: 112) menyatakan, “Kondisi kemiskinan yang dialami suatu masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama dapat mengakibatkan terbentuknya suatu budaya kemiskinan sebagai suatu sub budaya”.

Meskipun kemiskinan telah menjadi subyek penelitian ilmiah sejak lama dengan tema atau label yang beraneka ragam, akan tetapi apabila ditelaah lebih lanjut sebagian besar penelitian tentang kemiskinan yang dilakukan secara ilmiah lebih banyak ditekankan pada pemahaman. Sedangkan upaya secara

komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan masih jarang dilakukan meskipun banyak kebijaksanaan dalam menanggulangi kemiskinan telah dilaksanakan.

Pembangunan nasional merupakan suatu konsep penanggulangan sebagai proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah secara normatif bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun tidak menunjukkan hasil yang cukup berarti, karena masih banyak terdapat masyarakat dengan status keluarga pra sejahtera (belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal) dan sejahtera 1 (telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya).

Kegagalan pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan negara-negara berkembang dikarenakan kurang memperhatikan partisipasi masyarakat. Yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam tiga tahapan kegiatan: 1) perencanaan program, 2) pelaksanaan program, dan 3) penilaian program (Nainggolan, 2010: 89). Padahal masalah kemiskinan merupakan masalah sumberdaya manusianya, baik yang belum berkembang maupun yang belum dimanfaatkan secara optimal (Tjiptoherijanto 1997:78). Upaya pemberdayaan masyarakat miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, budaya dan politik merupakan hakekat utama dalam penanggulangan kemiskinan.

Kemampuan masyarakat (sumber daya manusia) untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program ditentukan dengan mengendalikan kemampuan yang dimilikinya sehingga pemberdayaan merupakan jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat miskin yang belum dilibatkan dalam pemberdayaan manusia sebagai pengentasan kemiskinan.

Beberapa langkah konkrit yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dijabarkan dalam berbagai program yang diharapkan menjadi instrumen utama kegiatan tersebut. Berbagai program yang dilaksanakan diantaranya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MANDIRI), Program Keluarga Harapan (PKH), program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik perdesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro, dan lain-lain (Hasil penelitian kemiskinan oleh Maimun Saleh). Salah satu bentuk kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah melalui pendekatan pemberdayaan keluarga yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera yang pelaksanaannya diatur dalam Inpres No. 3 Tahun 1996 tentang pembangunan keluarga sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia terhitung pada bulan Maret 2013 sebanyak 28,07 juta dengan penduduk miskin perkotaan sebanyak 10,33 juta dan

penduduk miskin desa sebanyak 17,74 juta . Kemiskinan di Sumatera Utara pada September 2013 sebanyak 1.390.800 orang (10,39%), angka ini bertambah sebanyak 51.600 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Maret 2013 yang berjumlah 1.339.200 orang (10,06%) (BPS 2013).

Dalam Inpres No.3 Tahun 1996 tentang pembangunan keluarga sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan menekankan perlunya usaha terpadu dan menyeluruh yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk memberikan kemampuan pada keluarga terutama keluarga yang masih dalam tahap Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS 1), agar dapat diberdayakan melalui usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatannya dalam suatu wadah yang disebut kelompok UPPKS. Kegiatan UPPKS yang dilaksanakan oleh badan kependudukan keluarga berencana nasional (BKKBN), antara lain; (1) UPPKS bidang industri rumah tangga, yaitu usaha sendiri bukan anak perusahaan dari bentuk usaha perseorangan, (2) UPPKS bidang usaha jasa, yang bergerak dalam pelayanan, (3) UPPKS bidang usaha per-dagangan, yang dilakukan dengan jual beli, serta UPPKS bidang pertanian, yang kegiatannya mengolah alam (Stigma Volum XIII No. 4 Tahun 2005).

Program keluarga berencana nasional tidak hanya menjalankan program keluarga berencana (KB) guna mengatasi ledakan penduduk saja, namun juga menyelenggarakan program lain seperti kesehatan reproduksi remaja, program ketahanan keluarga serta program penguatan keluarga kecil berkualitas melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS).

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan program yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan program KB, dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga yang salah satunya melalui kegiatan industri rumah tangga. Industri rumah tangga berfungsi sebagai wadah pembinaan, pengembangan, dan pengorganisasian usaha-usaha ekonomi produktif. Kegiatan industri rumah tangga ini merupakan kegiatan pendukung program KB yang anggotanya terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I, dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan wirausaha. Kelompok yang dirintis oleh BKKBN pada tahun 1976 ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga peserta KB agar kehidupannya menjadi lebih sejahtera. Salah satu hal yang mendasarinya adalah bahwa tanpa kondisi yang baik, mustahil keluarga akan dapat meningkatkan kesejahteraannya, dan ini harus dimulai dari memberdayakan keluarga dibidang ekonomi.

Upaya pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga terhadap keluarga Pra S dan KS I harus tetap diprioritaskan mengingat jumlahnya yang masih cukup banyak. Keluarga ini sangat rentan terhadap masalah-masalah ekonomi dan sosial. Sehingga sangat mungkin terjadi penurunan status kesejahteraan setiap saat. Tentunya keadaan ekonomi yang serba kekurangan akan menimbulkan dampak negatif bagi keluarga itu sendiri dan juga masyarakat.

Seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi keluarga, maka BKKBN membuat suatu program yang memfokuskan pada kesejahteraan masyarakat, agar masyarakat mampu meningkatkan pendapatan keluarga melalui berwirausaha sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera dengan terbentuknya program UPPKS. Kegiatan industri rumah tangga yang

dibentuk dalam program UPPKS telah memberi bukti bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, seperti yang telah dilakukan di Kabupaten Karanganyar tahun 2010 telah meningkatkan pendapatan keluarga sebanyak 8,14 persen, dan di Kecamatan Denpasar Barat tahun 2013 sebanyak 86,56 persen melalui program UPPKS dalam kegiatan industri rumah tangga.

Kecamatan Percut Sei Tuan terdiri dari 20 Desa/Kelurahan dengan 94.661 KK. Di Kecamatan Percut Sei Tuan masih terdapat keluarga Pra sejahtera yaitu 1.020 KK dan Keluarga Sejahtera 1 sebanyak 10.337 KK (Hasil pendataan keluarga tingkat kecamatan 2013). Di Kecamatan Percut Sei Tuan terdapat program UPPKS yang sangat aktif yaitu sebanyak 3 kelompok dengan anggota keluarga Pra S dan KS 1.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Industri Rumah Tangga Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Anggota UPPKS Di Kecamatan Percut Sei Tuan”**.

B. Identifikasi Masalah

Untuk menentukan masalah yang akan dirumuskan dan dipilih, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pengidentifikasian masalah dengan tujuan untuk memfokuskan penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah selama ini kurang memperhatikan partisipasi masyarakat.
2. Kondisi ekonomi masyarakat masih rendah.
3. Masih banyak jumlah masyarakat yang tergolong dalam keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1.

4. Masih banyak masyarakat miskin yang tidak mengikuti program UPPKS.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian, maka masalah penelitian ini dibatasi pada pengaruh industri rumah tangga terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga anggota UPPKS di Kecamatan Percut Sei Tuan.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah suatu problematika penelitian dan merupakan bagian pokok dari kegiatan penelitian pengaruh industri rumah tangga terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga anggota UPPKS di Kecamatan Percut Sei Tuan yang dituangkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Seberapa baik kegiatan industri rumah tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan?
2. Seberapa tinggi tingkat kesejahteraan keluarga anggota UPPKS di Kecamatan Percut Sei Tuan?
3. Seberapa besar pengaruh industri rumah tangga terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga anggota UPPKS di Kecamatan Percut Sei Tuan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang telah dirumuskan untuk mendeskripsikannya, menganalisis dan menginterpretasikan fokus penelitian. Sehingga tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa baik pelaksanaan industri rumah tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kesejahteraan keluarga anggota UPPKS di Kecamatan Percut Sei Tuan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh industri rumah tangga terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga anggota UPPKS di Kecamatan Percut Sei Tuan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi peserta yang belum, sedang, maupun purna KB untuk mengetahui pentingnya program UPPKS khususnya dalam kegiatan industri rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan masukan kepada jurusan Pendidikan Luar Sekolah, kepada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan.

- b. Sebagai sumbangan dan bahan acuan bagi peneliti lain jika ingin melakukan atau pengembangan lebih lanjut mengenai pengaruh industri rumah tangga terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga anggota UPPKS.